



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 9179-9192

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Politik Uang Dalam Pemilu 2019: Sebuah Kajian Interaksionisme Simbolik Pada Masyarakat Kelurahan Dompok Tanjungpinang

Randi Rizky Kurniawan<sup>1</sup>✉ Sri Wahyuni<sup>2</sup>, Nanik Rahmawati<sup>3</sup>

Jurusan Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: [randi.rizky96@gmail.com](mailto:randi.rizky96@gmail.com) ✉

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang politik uang dalam Pemilu 2019: sebuah kajian interaksionisme simbolik pada masyarakat Kelurahan Dompok Tanjungpinang. Pemilu merupakan instrumen yang dapat menjembatani kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Namun Pemilu di Indonesia seringkali dicerai kecurangan seperti praktik politik uang (money politic). Tindakan seperti pembelian suara (vote buying) acapkali terjadi. Di Indonesia terjadi Pergeseran istilah politik uang ke dalam istilah moral, dimana dalam konteks politik, politik uang dianggap sebagai bantuan di sebagian masyarakat. Begitu juga fenomena politik uang di Kelurahan Dompok yang merupakan daerah dengan kasus dugaan politik uang tertinggi di Kota Tanjungpinang, sebagian masyarakatnya mengkategorikan tindakan politik uang sebagai bantuan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian metode kualitatif, dengan teknik penentuan informan yaitu teknik Purposive Sampling. Peneliti mengambil sebanyak 8 orang informan yang dianggap dapat menjawab dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan lewat metode wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Interaksionisme simbolik dari Herbert Herbert mead sebagai pisau analisis fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif. Dengan memakai konsep mind, self dan society yang terdapat dalam teori interaksionisme simbolik Mead, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi masyarakat Kelurahan Dompok dengan bantuan yang diberikan calon pada pemilu 2019 membuat masyarakat memaknai bantuan tersebut menjadi, "bantuan sebagai pemberian untuk meminta dukungan suara" sehingga tindakan politik uang dianggap suatu kelaziman. jika merujuk pendapat para ahli maka tindakan pemberian bantuan dan menerima bantuan yang terjadi merupakan simbol politik uang.

Kata Kunci: Politik uang, Demokrasi, Pemilu, simbol.

## Abstract

This research discusses money politics in the 2019 election: a study of symbolic interactionism in Dompok village communities Tanjungpinang. Elections are an instrument that can bridge people's sovereignty in a democratic country. However, elections in Indonesia are often marred by fraud, such as the practice of money politics. Actions such as vote buying occur. In Indonesia, there has been a shift in the term money politics into moral terms, where in the political context, money politics is considered as assistance in some communities. Likewise, the phenomenon of money politics in the Dompok Village, which is the area with the highest cases of suspected money politics in Tanjungpinang City, some people categorize money politics as aid. In this study, the researcher used a qualitative method of research, with an information retrieval technique, namely the Purposive Sampling technique. Researchers took as many as 8 informants who were considered able to answer and get the information needed by researchers. Data collection techniques in this study were carried out through interviews and documentation. This study uses the theory of symbolic interactionism from Herbert Herbert Mead as a tool for analyzing the phenomenon under study. Researchers used inductive qualitative data analysis techniques. By using the concepts of mind, self and society contained in Mead's theory of symbolic interactionism, the results of this study indicate that the interaction of the people of the Dompok Village with the assistance provided by candidates in the 2019 election made the community interpret the assistance as, "assistance as a gift to ask for vote support" so that Money politics is considered a norm. If referring to the opinion of experts, the act of providing assistance and receiving assistance that occurs is a symbol of money politics.

*Keywords: Money politics, Democratic, Elections, symbols.*

## PENDAHULUAN

Beberapa negara modern di dunia mengklaim diri sebagai negara demokrasi, yang memiliki sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat (Fatiha et al., 2022). Dalam implementasinya, demokrasi dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan, yang memerlukan partai politik dan pemilihan umum sebagai instrumen penghubung antara rakyat dan pemerintah (Basuki, 2020). Pemilu dianggap sebagai salah satu parameter penting dalam mengevaluasi tingkat demokrasi suatu negara (Suprianto et al., 2019). Namun, menurut Van Ham dan Linderberg (2015) dalam Muhtadi (2020) terdapat masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu, seperti kecurangan dan penyelewengan elektoral. Praktik politik uang, seperti jual beli suara, juga ditemukan di negara-negara demokrasi baru. Hasil survei Afrobarometer putaran 3 tahun 2005 menunjukkan adanya praktik politik uang yang massif di tujuh negara demokratis di Afrika, yaitu Ghana, Mali, Namibia, Afrika Selatan, Benin, Senegal, dan Botswana. Survei Americas Barometer tahun 2010 yang dilakukan oleh Latin American Public Opinion Project (LAPOP) juga menunjukkan adanya praktik politik uang yang massif dan variasi yang menarik di seluruh wilayah Amerika Latin dan Karibia. Hasil survei Pulse Asia tahun 2013 di Filipina menunjukkan bahwa sekitar 22% dari total pemilih pernah ditawari politik uang

selama pemilu 2013.

Menurut Sihidi (2019) Politik uang memiliki keterkaitan yang erat dengan tipe pemilih mengambang pragmatis. Pragmatis mengacu pada sifat manusia yang cenderung praktis, realistis, dan kaku dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pemilihan umum, sikap pragmatis tercermin dalam pemilihan preferensi politik berdasarkan pertimbangan transaksional. Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah lebih rentan terpengaruh oleh politik uang. Dalam pandangan masyarakat, politik uang dianggap sebagai bentuk insentif yang lebih nyata dibandingkan dengan program yang dijanjikan oleh politisi selama masa kampanye. (Hermawan, 2018).

Menurut Muhtadi (2020) Pemilu di Indonesia merupakan studi kasus yang menarik untuk menjelaskan dinamika jual beli suara dalam konteks negara pasca-otoriter. Setelah reformasi pada 1998, sistem multi-partai yang kompetitif muncul, meskipun mayoritas partai baru tidak memiliki kredibilitas yang cukup. Ideologi partai yang tidak jelas menyebabkan masyarakat kebingungan membedakan antar partai. Sistem Pemilu lebih menitikberatkan pada peran calon legislatif (candidate-centered) membuat calon terpaksa untuk mengumpulkan personal vote dan melakukan strategi klientelistik, yang lebih mengutamakan personalitas calon daripada kampanye berbasis partai (party-centered). Akibatnya, calon terjebak dalam lingkaran politik uang. Oleh karena itu, politik uang menjadi fokus utama kampanye Pemilu di Indonesia, yang terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari mahar politik saat pencalonan, jual beli suara saat kampanye dan pemungutan suara, penyogokan penyelenggara Pemilu saat penghitungan dan rekapitulasi suara, hingga suap saat penyelesaian sengketa hasil Pemilu. (Sjafrina, 2019).

Beberapa penelitian menunjukkan makna politik uang bagi penerima di Indonesia. Misalnya penerima menginterpretasikannya sebagai pembayaran, hadiah, perbaikan dosa masa lalu, intimidasi, politik Pengakuan calon, mengidentifikasi kejelekan calon, sekaligus ada yang membandingkannya sebagai tanda kekuatan (Rahmi & Putra, 2022). Masyarakat umum menganggap politik uang sebagai kebiasaan, bahkan masyarakat desa dengan solidaritas yang kuat, politik uang dianggap memiliki peran penting dalam menyatukan suara masyarakat dalam kompetisi politik. Masyarakat menganggap politik uang sebagai rezeki tidak terduga untuk memenuhi kebutuhan. Telepas dari benar tidaknya, secara realistis masyarakat menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah dan menguntungkan (Nabilah et al., 2022).

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dirilis oleh BPS (2021) mengukur seberapa permisif masyarakat terhadap politik uang dan pengetahuan mereka tentang anti-korupsi. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Indonesia masih menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar. Data ini menunjukkan bahwa sebanyak 22,47% responden pada tahun 2020 dan 22,75% responden pada tahun 2022 menganggap hal tersebut sebuah kewajaran. Variabel kedua yaitu tindakan menerima pembagian uang/barang/fasilitas pada Pilkades/Pilkada/Pemilu, sebanyak 32,74% responden pada tahun 2020 dan 32,44% pada tahun

2021 mewajarkan tindakan tersebut.

Bawaslu Kepulauan Riau pernah menangani lima perkara dugaan politik uang yang terjadi di Kota Batam dan Tanjungpinang pada tahun 2019 (Ogen, 2019). Dari data yang diperoleh dari Bawaslu Kota Tanjungpinang (2022), terdapat 7 kasus dugaan pelanggaran politik uang selama Pemilu tahun 2019, yang terbagi menjadi 5 temuan Bawaslu dan 2 pelaporan masyarakat. Kelurahan Dompok di Kota Tanjungpinang diidentifikasi sebagai daerah dengan kasus dugaan politik uang tertinggi yaitu 2 kasus dugaan pelanggaran politik uang.

Politik uang atau korupsi elektoral adalah tindakan curang yang terjadi dalam Pemilu, yang merupakan bagian dari praktik korupsi. Korupsi elektoral dapat mencakup pembelian suara dengan uang, menjanjikan posisi atau hadiah khusus, pemaksaan atau dalam bentuk lain (Satria, 2019). Politik uang tercipta melalui interaksi antara calon dan pemilih pada saat Pemilu. Menurut teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead dalam Ritzer dan Goodman (2014) Interaksi berasal dari ide-ide dasar yang membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia, hubungannya dengan interaksi sosial, dan bertujuan untuk memediasi dan menginterpretasi makna di tengah masyarakat. Interaksi tersebut merupakan satu-satunya cara untuk membentuk makna dalam hubungan dengan individu lain (Siregar, 2016). Mead membagi interaksionisme simbolik kedalam 3 ide dasar, antara lain:

1. Pikiran (Mind) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain.
2. Diri (Self) adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain ("I" dan "Me"), dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (The-Self) dan dunia luarnya.
3. Masyarakat (Society) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku (tindakan) yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya.

Politik uang bagaikan fenomena gunung es yang hanya pucuknya saja yang muncul kepermukaan. Sebenarnya politik uang sudah menjadi rahasia umum ditengah masyarakat, paling tidak itu yang dikatakan oleh salah satu ketua RT di Kelurahan Dompok. Beberapa masyarakat Kelurahan Dompok bahkan memaknai politik uang sebagai bantuan dari calon yang maju saat pemilihan. Berangkat dari uraian ini maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana simbol politik uang yang terbentuk pada masyarakat Kelurahan Dompok.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana dalam metode ini peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2015). Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder, yang didapat dari dokumen resmi seperti laporan masyarakat dan temuan Bawaslu Kota Tanjungpinang tentang dugaan pelanggaran pidana politik uang pada pemilu 2019. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial yang diteliti, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara rinci, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu teknik wawancara dengan memakai pedoman wawancara dan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan informasi yang diberikan informan untuk menemukan masalah secara lebih terbuka dan mencari pendapat dan ide dari informan yang diwawancarai (Sugiyono, 2015). Dalam wawancara peneliti menambahkan beberapa pertanyaan di luar pertanyaan yang disertakan dalam panduan wawancara untuk lebih memperdalam temuan. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa masa lalu. Dokumen yang peneliti kumpulkan yaitu; Data Pemilih Tetap (DPT) Kelurahan Dompok pada Pemilu 2019 dari KPU Kota Tanjungpinang. Data pelaporan masyarakat dan temuan Bawaslu Kota Tanjungpinang tentang dugaan pelanggaran pidana politik uang pada pemilu 2019 di Kelurahan Dompok.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu yang diinginkan oleh peneliti (Hamzah, 2017). Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan (Sugiyono, 2015). Informan kunci adalah Ketua Bawaslu Tanjungpinang, yang merupakan penanggung jawab umum aktivitas pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran Pemilu. Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dengan interaksi yaitu masyarakat Kelurahan Dompok yang memiliki hak pilih dan berumur diatas 17 tahun yang pernah diberikan bantuan dalam Pemilu 2019 dan ikut serta dalam memilih. Sedangkan informan tambahan adalah ketua RT yang merupakan tokoh masyarakat yang memahami kondisi masyarakat secara langsung dan masyarakat Kelurahan Dompok yang sudah berumur diatas 17 tahun yang ikut serta dalam memilih pada Pemilu 2019 namun tidak pernah diberikan bantuan oleh calon.

Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif yang berarti data yang diperoleh dianalisis untuk mengembangkan hipotesis (Sugiyono, 2015). Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai datanya jenuh. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi kemudian direduksi untuk menemukan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam menarik kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum data, mengkode, menemukan tema, dan menyebarluaskan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema yang telah ditentukan untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan (Rijali, 2018). Reduksi data meliputi:

merangkum data, mengkode, menemukan tema, dan menyebarkan data. Data yang dianalisis adalah hasil dari wawancara dan dokumentasi yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data dikelompokkan menjadi tema-tema yang telah ditentukan, seperti interaksi dengan Pemilu dan bantuan dari calon, interpretasi bantuan, serta tindakan terkait bantuan. Data dokumentasi yang dianalisis adalah data Daftar Pemilih Tetap dari KPU Tanjungpinang dan dugaan kasus politik uang dari Bawaslu Tanjungpinang. Setelah data direduksi, maka peneliti akan menyajikan data dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian, peneliti akan menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan diteliti sesuai dengan masalah yang diteliti.

Menurut Rijali (2018) penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penelitian ini menggabungkan data hasil wawancara dan dokumentasi lalu peneliti sajikan dalam bentuk teks naratif. Penarikan kesimpulan peneliti lakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap menjadikan tujuan dan fokus penelitian yang hendak dicapai sebagai acuan. Dalam penelitian ini peneliti terus-menerus melakukan upaya untuk menarik kesimpulan selama di lapangan. Mulai dari pengumpulan data, mencari arti dari objek-objek, mencatat pola-pola yang teratur (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini dikelola dengan longgar, terbuka, dan skeptis, tetapi sudah disiapkan. Pertama-tama tidak jelas, tetapi kemudian meningkat menjadi lebih jelas dan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara: 1) merenungkan ulang saat menulis; 2) tinjauan ulang catatan lapangan; 3) diskusi dan pertukaran pendapat dengan rekan sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif; 4) berusaha untuk menempatkan temuan yang sama dalam beberapa set data yang berbeda untuk memperoleh konteks yang lebih luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Dompok memiliki pengalaman interaksi dengan segala aktivitas yang terkait dengan Pemilu 2019. Interaksi tersebut dapat dilihat dari jumlah DPT Kelurahan Dompok yang terdaftar di KPU yaitu sebesar 2452 pemilih dan pengalaman informan dalam menggunakan hak pilihnya. Keikutsertaan informan dalam pemilihan disertai dengan beberapa alasan, seperti: 1) Memilih karena mengikuti orang lain; 2) Memilih karena merasa memiliki kewajiban untuk menggunakan hak suaranya; 3) Memilih karena tidak ingin golput. Peneliti menemukan bahwa alasan memilih karena kewajiban menjadi alasan yang paling dominan, namun dalam temuan awal ini peneliti tidak menemukan adanya alasan yang berlandaskan kepada tindakan politik uang seperti memilih karena diberikan bantuan. Selain itu, interaksi masyarakat Kelurahan Dompok dengan aktivitas Pemilu 2019 juga tergambar dalam pengalaman mengikuti, menyaksikan, atau

mengetahui adanya kegiatan kampanye.

Tingginya kasus dugaan pelanggaran politik uang di Kelurahan Dompok selama Pemilu 2019, memungkinkan masyarakat juga berinteraksi dengan tindakan politik transaksional dalam Pemilu tersebut. Interaksi masyarakat Kelurahan Dompok dengan tindakan politik uang dapat dilihat dari banyaknya informan yang memiliki pengalaman diberikan bantuan oleh calon. Berdasarkan temuan peneliti, terdapat 3 kategori jenis bantuan yang diberikan calon pada saat Pemilu 2019. Pertama, bantuan dalam bentuk uang. Kedua, bantuan dalam bentuk sembako. Ketiga bantuan dalam bentuk materi lainnya. Pemberian dalam bentuk sembako adalah yang paling banyak diutarakan informan kepada peneliti. Namun tidak dipungkiri, tidak semua masyarakat pernah diberikan bantuan oleh calon, ada pula informan yang tidak pernah berinteraksi dengan tindakan politik uang ketika Pemilu 2019.

Masyarakat Kelurahan Dompok juga menyadari maksud dan tujuan dari bantuan yang diberikan calon pada saat Pemilu 2019, yaitu sebagai upaya calon untuk meminta dukungan suara kepada mereka. Bahkan bagi mayoritas informan bantuan tersebut, bantuan merupakan pemberian yang memang harus dibalas dengan hak suara. Bantuan dalam wujud uang, sembako dan materi lainnya yang diberikan calon kepada masyarakat Kelurahan Dompok dengan tujuan mempengaruhi suara pemilih, sejatinya merupakan simbol politik uang, karena secara garis besar politik uang adalah korupsi elektoral dalam bentuk mobilisasi elektoral yang terdiri dari pemberian uang, hadiah atau materi lainnya kepada pemilih agar dapat mencoblos calon tertentu dalam pemilihan (Muhtadi, 2020).

Menurut Pahlevi & Amrurrobi (2020) tanpa disadari, korupsi sesungguhnya terjadi karena proses terpilihnya pemimpin melalui biaya politik yang tinggi. Biasanya dengan cara menyuap masyarakat ketika Pemilihan. Namun justru banyak dari informan yang mengaku tidak peduli dengan efek masa depan dari bantuan yang mereka terima. Bagi sebagian masyarakat yang terpenting adalah bantuan yang diberikan, persoalan apa yang akan dilakukan calon di masa depan bukan menjadi urusan mereka lagi. Pengalaman interaksi seperti ini juga ikut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tindakan yang mengarah pada politik uang. Sebagian masyarakat yang belum pernah diberikan bantuan oleh calon mengakui khawatir praktik tersebut akan memberikan efek jangka Panjang, yaitu korupsi nya calon tersebut di masa mendatang. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang lain yang tidak peduli.

Bantuan sebagai Pemberian (Peran Mind dalam Pembentukan Simbol Politik Uang pada Masyarakat Kelurahan Dompok)

Jika di telaah dalam beberapa publikasi dan literatur mengenai bantuan yang didistribusikan calon ketika Pemilu, maka dalam konteks penelitian ini sejatinya bantuan yang diberikan calon pada masyarakat Kelurahan Dompok merupakan tindakan politik uang. Hal ini karena perilaku politik uang dalam konteks politik sekarang, memang seringkali di atasnamakan

sebagai bantuan dan lain-lain (Suprianto et al., 2019). Menurut Muhtadi (2020) secara garis besar, politik uang adalah korupsi elektoral dalam bentuk mobilisasi elektoral yang terdiri dari pemberian uang, hadiah atau barang kepada pemilih agar dapat mencoblos calon tertentu dalam pemilihan. Penjelasan tersebut jika di konklusikan maka dapat dipahami bahwa masyarakat Kelurahan Dompok menginterpretasikan bantuan (uang, sembako, dan materi lainnya) yang diberikan calon sebagai sebuah "pemberian" dalam pikirannya.

Penjelasan diatas sejalan pula dengan Pemikiran Mead mengenai konsep *mind* (pikiran). Konsep *mind* dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana bantuan dalam pemilu yang diberikan dapat mempengaruhi cara pandang dan pandangan masyarakat terhadap proses pemilihan. Menurut Mead dalam Talakua (2018) manusia adalah individu mampu berpikir, berperasaan, memberi pengertian kepada setiap keadaan melahirkan reaksi dan interpretasi kepada setiap rangsangan terhadap apa yang dihadapi. Dalam interaksi sosial orang mempelajari makna dan simbol yang memungkinkan mereka menjalankan kemampuan manusia untuk berpikir sehingga memungkinkan orang bertindak dan berinteraksi.

Menurut Mead dalam Ritzer & Goodman (2014) pikiran (*mind*) adalah fenomena sosial, pikiran bukanlah proses percakapan seseorang dengan dirinya sendiri. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosial. Proses sosial mendahului pikiran dan proses sosial bukanlah produk pikiran. Kalau demikian, apa peran pikiran bagi individu? Mead mengatakan bahwa *mind* mempunyai kemampuan untuk memunculkan dalam dirinya sendiri tidak hanya satu respon saja, tetapi juga respon komunitas secara keseluruhan. Ini berarti pikiran memberikan respon terhadap simbol tertentu. Dan, apabila individu mempunyai respon itu dalam dirinya, itulah yang dinamakan pikiran atau singkatnya proses interpretasi terhadap suatu tindakan.

Pikiran atau *mind* dalam konteks kajian yang peneliti tulis berusaha memahami bagaimana pikiran masyarakat Kelurahan Dompok dalam mengkategorikan bantuan yang diberikan calon pada Pemilu 2019 sebagai sebuah pemberian. Begitu juga bagi masyarakat yang tidak pernah mendapat bantuan ketika Pemilu 2019, meskipun mereka tidak pernah berinteraksi langsung dengan bantuan yang diberikan calon, namun secara imajinatif, setiap jawaban yang mereka berikan menunjukkan bahwa mereka juga mengklasifikasikan bantuan sebagai pemberian. Interpretasi inilah yang disebut oleh Mead sebagai *mind* karena masyarakat berusaha mengkategorikan bantuan yang diberikan calon di dalam pikirannya. Walaupun bantuan yang diberikan bentuknya berbeda-beda namun pikiran masyarakat merujuk kepada satu interpretasi yaitu bantuan sebagai "pemberian".

Analisis peneliti menggunakan konsep *mind* dalam temuan awal ini belum menjelaskan secara eksplisit bagaimana interpretasi masyarakat mengenai bantuan dari calon tersebut secara menyeluruh. apakah masyarakat tersebut menyadari pemberian bantuan merupakan simbol politik uang atau memang memaknainya hanya sekedar sebagai pemberian? Apakah tindakan tersebut mempengaruhi pilihan mereka dalam Pemilu? Lalu bagaimana respon mereka

terhadap tindakan politik uang tersebut. Untuk itu peneliti merasa perlu menjelaskan simbol politik uang yang terbentuk pada masyarakat Kelurahan Dompok secara komprehensif yang akan peneliti bahas pada subbab berikutnya.

Bantuan sebagai Pemberian untuk Meminta Dukungan Suara (Peran Self dalam Interaksi dengan Simbol Politik Uang pada Masyarakat Kelurahan Dompok)

Konsep *self* dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana bantuan dalam pemilu yang diberikan sebagai simbol politik uang mempengaruhi persepsi diri dan hubungan sosial masyarakat. Menurut Mead manusia selain mampu mengkategorikan tindakan dalam pikirannya, manusia juga mampu mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam bertindak dan berinteraksi berdasarkan tafsir mereka atas suatu keadaan dan memunculkan berbagai alternatif respon dalam pikirannya. Pikiran mengenai ini muncul beriringan dengan proses *self* (diri). Bagi Mead dalam Ritzer & Goodman (2014) Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai suatu obyek dan di lain pihak sebagai subyek. Dalam relasi sosial, diri sering berperan sebagai obyek dan subyek. Diri muncul dan berkembang jika terjadi komunikasi sosial atau komunikasi antarmanusia. Diri berhubungan secara dialektis dengan *mind* (pikiran).

Hasil penelitian menunjukkan kebanyakan masyarakat menyadari dan memahami bantuan yang diberikan calon memiliki maksud tertentu. Secara umum masyarakat memaknai bantuan sebagai pemberian untuk meminta dukungan suara. Pada fase ini mereka memposisikan diri sebagai obyek sekaligus subyek atau calon sebagai pemberi ("I") dan dirinya sebagai penerima ("Me") (Ritzer & Goodman, 2014). Dalam konteks penelitian ini menunjukkan masyarakat berupaya menafsirkan maksud dari bantuan yang diberikan tersebut dari sudut pandang calon dan bagaimana calon tersebut memandang dirinya. Sederhananya ketika proses interaksi berlangsung, individu akan mencoba merefleksikan dirinya sebagai pemberi sekaligus penerima dan mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan untuk merespon bantuan tersebut. Sebagai hasilnya masyarakat memaknai bantuan sebagai pemberian untuk meminta dukungan suara, dengan kata lain "aku kasih, kamu pilih". Inilah yang dimaksud Mead sebagai *self* dimana pada akhirnya terdapat kesamaan antara masyarakat sebagai penerima dan calon sebagai pemberi.

Begitu juga perihal tidak pedulinya sebagian masyarakat terhadap efek jangka panjang dari bantuan yang diberikan, yaitu kemungkinan akan korupsinya calon tersebut dimasa depan. Ketidakpedulian ini muncul juga didasarkan atas kemampuan individu merefleksikan dirinya sebagai calon yang memberikan bantuan. masyarakat yang berinteraksi mencoba memposisikan dirinya sebagai calon yang memberikan bantuan dan membayangkan apa yang akan dilakukan calon di kemudian hari. Disaat yang hampir bersamaan ia juga berinteraksi dengan dirinya sendiri tentang apa yang harus ia lakukan terhadap tindakan tersebut. dan

hasilnya adalah ketidakpedulian itu.

Pandangan masyarakat terhadap tindakan politik uang memberi pengaruh terhadap respon mereka pada tindakan tersebut. Karakteristik dari interaksionisme simbolik ditandai dengan hubungan antarindividu dalam masyarakat melalui komunikasi menggunakan simbol-simbol yang mereka ciptakan atau biasa disebut dengan stimulus dan respon. Dalam konteks penelitian ini dapat stimulus dapat dihubungkan dengan "bantuan" dari tindakan "menerima" oleh masyarakat sebagai respon.

Temuan peneliti menunjukkan bahwa secara sadar masyarakat memahami bantuan yang diberikan calon dalam sebuah interaksi sebagai sebuah stimulus, situasi atau peluang untuk bertindak, bukan sebagai paksaan. Peneliti menemukan walaupun terdapat kesamaan makna politik uang di sebagian masyarakat yang pernah diberikan bantuan, respon yang dimunculkan melalui tindakan masing-masing individu rupanya berbeda-beda. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan secara umum menjadi sebagai berikut: 1) Menerima bantuan dan memilih calon yang memberikan bantuan; 2) Menerima bantuan namun belum tentu memilih calon yang memberikan bantuan;

Dari tiap tindakan inilah peran dari masing-masing individu terlihat yaitu calon yang berperan sebagai pemberi bantuan, lalu masyarakat yang berperan sebagai penerima yang mendukung calon dan masyarakat yang berperan sebagai penerima namun tidak mendukung calon tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Mead, ketika interaksi berlangsung, tiap partisipan mengambil perannya sendiri-sendiri yang bersifat khusus, namun adakalanya para partisipan dalam memaknai perannya tidak konsisten sehingga mereka (aktor) memodifikasi peran untuk menghubungkan peran yang satu dengan peran lainnya (Derung, 2017).

Penjelasan Mead juga dapat menjawab temuan peneliti selanjutnya, yaitu di masyarakat yang belum pernah diberikan bantuan oleh calon atau belum pernah berinteraksi dengan politik uang, terdapat 2 kategori tindakan pula jika misalnya mereka dihadapkan dengan politik uang yaitu: 1) menolak bantuan dan belum tentu memilih calon yang memberikan bantuan; 2) menerima bantuan yang diberikan dan memilih calon yang memberikan tersebut.

Dari semua jawaban informan dapat dilihat bagaimana masyarakat merespon bantuan yang diberikan. Beberapa informan menyatakan bahwa bantuan tersebut mempengaruhi pilihan mereka dalam memberikan hak suara. Namun, ada juga informan yang menyatakan bahwa bantuan tersebut tidak mempengaruhi pilihan mereka dalam memberikan hak suara. Selain itu hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa banyak informan yang menerima bantuan menjadi lebih tergantung pada pihak yang memberikan bantuan dan mengurangi rasa tanggung jawab atas pilihan yang diambil.

Bantuan dalam Pemilu sebagai Simbol Politik uang (Peran Society dalam Pembentukan Simbol Politik Uang di Kelurahan Dompok)

Sesungguhnya bantuan yang diberikan calon dalam bentuk uang, sembako dan materi lainnya kepada masyarakat Kelurahan Dompok pada saat Pemilu 2019 adalah tindakan politik uang, karena tindakan ini sejalan dengan pendapat beberapa ahli yang secara umum mengatakan politik uang adalah korupsi elektoral dalam bentuk mobilisasi elektoral yang terdiri dari pemberian uang, hadiah atau materi lainnya kepada pemilih agar dapat mencoblos calon tertentu dalam pemilihan (Muhtadi, 2019).

Menurut Mead dalam Derung (2017) tindakan seseorang adalah hasil dari stimulasi internal dan eksternal atau dari bentuk sosial diri dan masyarakat. Kaitannya dalam penelitian ini yaitu, interpretasi masyarakat Kelurahan Dompok terhadap bantuan yang diberikan calon pada Pemilu 2019 sebagai pemberian untuk meminta dukungan suara melahirkan respon dengan beragam tindakan seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya.

Pemaknaan masyarakat terhadap bantuan dan setiap tindakan yang mereka ambil sebagai respon dari stimulus inilah yang di sebut Mead sebagai masyarakat (*society*), yaitu kumpulan tindakan yang dilakukan individu yang membentuk masyarakat. Masyarakat (*society*) pada umumnya berarti proses sosial tanpa henti, yang mendahului pikiran dan diri.. Masyarakat juga merupakan kumpulan tanggapan yang terorganisir yang membentuk individu "me". Dalam berinteraksi, masing- masing diri (*self*) dan masyarakat (*society*) sebagai aktor dan keduanya tak dapat dipisahkan, saling mempengaruhi dan menentukan (Ritzer & Goodman. 2014).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini politik uang yang dilakukan calon menjadi stimulus dalam sebuah interaksi sosial antara calon dan masyarakat. Stimulus tersebut memicu respon dari masyarakat yang terlibat interaksi. Singkatnya dalam proses interaksi masyarakat berupaya mengkategorikan tindakan calon sebagai "bantuan". Selanjutnya setiap individu berupaya menafsirkan makna dari bantuan dengan merefleksikan dirinya sebagai pemberi (Obyek atau "I") dan dirinya sendiri sebagai penerima (Subyek atau "Me") sehingga munculah sebuah tafsir dengan makna yang sama diantara keduanya yaitu "bantuan sebagai pemberian untuk meminta dukungan suara". Selanjutnya ia akan merespon tindakan calon tersebut dengan tindakan pula. Namun tindakan tersebut dapat berbeda-beda bisa dalam bentuk menerima bantuan lalu memberikan suara, menerima namun tidak memberikan suara, menolak bantuan dan tidak memberikan suara.

Hasil wawancara dengan keseluruhan informan menunjukkan tindakan menerima lalu memberikan suara atau memilih calon yang memberikan bantuan mendominasi temuan peneliti. Hal ini membuktikan bahwa politik uang dapat mempengaruhi preferensi pemilih sehingga menyebabkan perubahan sikap dan perilaku yang tidak sehat dalam proses pemilihan, seperti tidak mempertimbangkan kualitas calon yang akan dipilih dan hanya mengikuti pilihan pihak yang memberikan bantuan. secara tidak langsung *Society* dapat mempengaruhi norma yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan tindakan politik uang.

## SIMPULAN

Perhelatan Pemilu 2019 memberikan ruang kepada masyarakat Kelurahan Dompok untuk berinteraksi dengan segala aktivitas yang ada didalamnya termasuk tindakan politik uang dalam bentuk pemberian bantuan oleh calon yang berkompetisi dalam kontestasi politik. Sejatinya, bantuan yang diberikan calon dalam bentuk uang, sembako dan materi lainnya kepada masyarakat Kelurahan Dompok pada saat Pemilu 2019 adalah simbol politik uang. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut sejalan dengan pendapat beberapa ahli secara umum, yaitu politik uang adalah korupsi eklektoral dalam bentuk mobilisasi elektoral yang terdiri dari pemberian uang, hadiah atau materi lainnya kepada pemilih agar dapat mencoblos calon tertentu dalam pemilihan. Hal ini juga diperkuat dengan interpretasi masyarakat terhadap bantuan tersebut, yaitu pemberian calon untuk meminta dukungan suara sehingga sangat memenuhi unsur untuk dikategorikan sebagai simbol politik uang.

Dalam teori interaksionisme simbolik tindakan politik uang yang dilakukan calon menjadi stimulus dalam sebuah interaksi sosial antara calon dan masyarakat. Stimulus tersebut memicu respon dari masyarakat yang terlibat interaksi. Singkatnya dalam proses interaksi masyarakat berupaya mengkategorikan tindakan calon sebagai "bantuan" didalam pikirannya. lalu masyarakat mencoba menafsirkan makna dari bantuan itu dengan merefleksikan dirinya sebagai calon sebagai si pemberi (Obyek atau "I") dan dirinya sendiri sebagai penerima (Subyek atau "Me"). Hal ini memunculkan sebuah tafsir dengan makna yang sama diantara keduanya yaitu "bantuan sebagai pemberian untuk meminta dukungan suara". Setelah simbol ini dimaknai oleh setiap individu di masyarakat yang terlibat dalam interaksi tersebut, maka selanjutnya ia akan merespon tindakan calon tersebut dengan tindakan pula. Tindakan ini bisa dalam bentuk menerima lalu mendukung, menerima namun tidak mendukung, bahkan menolak dan tidak mendukung si calon. Respon yang diberikan ini tergantung keadaan sehingga membuat bentuk tindakannya dapat berbeda-beda. Kumpulan dari setiap tindakan inilah yang saling mempengaruhi satu sama lain dan membentuk masyarakat (society).

Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak orang yang menerima bantuan dari calon tertentu ketika Pemilu 2019, memberikan suaranya atau memilih calon yang memberikan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang dapat mempengaruhi preferensi pemilih dan menyebabkan perubahan sikap dan perilaku yang tidak sehat dalam proses pemilihan, seperti tidak mempertimbangkan kualitas calon yang akan dipilih dan hanya mengikuti pilihan pihak yang memberikan bantuan. Secara tidak langsung, society dapat mempengaruhi norma yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan tindakan politik uang dimana sebagian masyarakat di Kelurahan Dompok memandang tindakan tersebut sebagai sebuah kewajiban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>

- Derung, T. N. (2017). Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Karakteristik Dan Pastoral*, 2(1), 118–131. <https://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/33>
- Fatiha, A. S., Soeharjoto, & Santosa, W. (2022). Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi di Indoneisa. *JPDSH: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 345–352.
- Hermawan, J. R. (2018). Persepsi Masyarakat Desa Kurungan Nyawa Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Pesawaran 2015 Oleh : Juni Renaldu Hermawan. Fisip Unila.
- Muhtadi, B. (2019). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 55–74. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>
- Nabilah, R., Afrizal, S., & Bahrudin, F. A. (2022). Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Publisitas*, 8(2), 84–96. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i2.132>
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.
- Rahmi, N. A. K., & Putra, E. V. (2022). Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Perspektif*, 5(3), 423–431. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.642>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas : Jurnal Anti Korupsi*, 5(1), 1–14. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/342>
- Sihidi, I. T., Khanifah, L. N., & Romadhan, A. A. (2019). Relasi Politik Uang Dan Party-Id Di Indonesia. *CosmoGov*, 5(2), 204. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.23293>
- Siregar, N. S. S. (2016). Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. *Perspektif*, 1(2), 100–110. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.86>
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 05(1), 43–53. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/389/71>
- Suprianto, L. O., Arsyad, M., & Tawulo, M. A. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap politik Uang Pada Pilkada Serentak (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara). 2(1), 1–10.
- Talakua, Y. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Iklan Rokok di Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. *Simulacra: Jurnal Sosiologi*, 1(1), 65–78. <https://doi.org/10.21107/sml.v1i1.4985>
- BPS. (2021). Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2021. 1. <https://www.bps.go.id/publication/2021/09/08/c3e5f87d94f30ff43e848d5c/indeks-perilaku-anti-korupsi-2021.html>

- Ogen. (2019). Bawaslu Kepri tangani lima dugaan politik uang. <https://www.antaraneews.com/berita/834261/bawaslu-kepri-tangani-lima-dugaan-politik-uang>
- Muhtadi, B. (2020). Buku Kuasa Uang.pdf (1st ed.). Jakarta: Gramedia.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2014). Teori Sosiologi (I. R. Muzir (ed.); 10th ed.). Kreasi Wacana.
- Sugiyono, D. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Alfabeta.
- Bawaslu Kota tanjungpinang. (2022). Data Pelaporan Masyarakat dan Temuan Bawaslu Kota Tanjungpinang Tentang Dugaan Pelanggaran Pidana Politik Uang pada Pemilu 2019.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019). Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Untuk Setiap Tps Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Untuk Provinsi Kepulauan Riau. [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/10\\_KEPRI.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/10_KEPRI.pdf)